

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil yang diperoleh setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Viva Generik Kebonsari mulai tanggal 16 Januari sampai dengan 17 Februari 2017, disimpulkan sebagai berikut:

1. Calon apoteker mampu meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Calon apoteker mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Calon apoteker memperoleh persiapan untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Calon apoteker mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dapat diberikan kepada Apotek Viva Generik Kebonsari, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Apotek Viva Generik Kebonsari disarankan untuk memperbaiki sistem pengadaan obat agar tidak terjadi penolakan resep maupun non resep terhadap pasien.
3. Ruang tunggu pasien dengan tempat penyimpanan dan peracikan obat sebaiknya diberi sekat yang tidak transparan agar pasien tidak bisa melihat proses peracikan obat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2015, **MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi ed. 3**, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- Departemen Farmakologi dan Terapeutik FKUI., 2007, *Farmakologi dan Terapi*, ed. 5, Bagian Farmakologi FKUI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/ MENKES/ SK/ X/ 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/ MENKES/ PER/X/ 1993** tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Dipiro J.T., Robert L.T., Gary R.M., Gary C.Y., Barbara G.W., Michael L.P., 2008, **Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach** 7<sup>th</sup> ed., McGraw-Hill Medical, New York.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, **Drug Information Handbook 17<sup>th</sup> ed.**, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, **AHFS Drug Information**, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menkes RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menkes RI, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Menkes RI, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2004, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc., [2015]., ***MIMS Drug Information System***. [Online]. <http://mims.com/Indonesia/drug/info/Buscopan%20Plus/>, [2017, Maret 1].
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat diserahkan Tanpa Resep.

Presiden RI, 1997, *Undang-Undang No. 5 tentang Psikotropika*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Presiden RI, 2009, *Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Presiden RI, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi ed. 3*, Airlangga University Press, Surabaya.

Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : TU.08.03/ IV/ 1400/ 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian.

Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36<sup>th</sup> ed.*, Pharmaceutical Press, London.